

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan gerakan sosial di Indonesia beberapa tahun terakhir memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam cara masyarakat, khususnya mahasiswa, mengekspresikan kritik terhadap pemerintah. Jika pada periode-periode sebelumnya simbol perlawanan lebih banyak diwujudkan melalui spanduk, poster, atau slogan politik, maka pada rentang waktu 2020–2025 mulai muncul penggunaan simbol yang berasal dari budaya populer sebagai media penyampaian pesan politik. Salah satu fenomena yang paling banyak menarik perhatian publik adalah pengibaran bendera Jolly Roger dari serial *One Piece* dalam berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan aksi protes masyarakat. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa simbol yang awalnya dikenal sebagai identitas kelompok bajak laut dalam karya fiksi telah mengalami perubahan makna menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dipersepsikan tidak lagi berpihak pada kepentingan publik (Edelman, 1964; Oda, 1997–2025).

Penggunaan simbol tersebut bukan sekadar mengikuti tren budaya populer. Bagi sebagian mahasiswa dan generasi muda, Jolly Roger dipahami sebagai representasi perjuangan melawan ketidakadilan, penolakan terhadap dominasi kekuasaan, serta keberanian mempertahankan kebebasan. Pergeseran makna ini menunjukkan bahwa budaya populer tidak lagi berada di luar ruang politik, melainkan telah menjadi salah satu medium yang digunakan untuk membangun identitas kolektif, menyampaikan kritik, dan memperluas resonansi gerakan sosial kepada masyarakat yang lebih luas (Storey, 2018; Hall, 1980).

Kemunculan simbol tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik Indonesia sepanjang periode 2020–2025. Berbagai kebijakan pemerintah memunculkan gelombang penolakan dari kelompok masyarakat sipil, terutama mahasiswa. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga berbagai kebijakan lain yang dinilai mempersempit ruang partisipasi publik melahirkan

demonstrasi di berbagai daerah. Mahasiswa kembali menempatkan diri sebagai kelompok penekan yang berupaya mengawasi jalannya pemerintahan melalui aksi kolektif di ruang publik maupun ruang digital (BEM Seluruh Indonesia, 2024).

Rangkaian aksi tersebut memperlihatkan bahwa kritik mahasiswa tidak lagi berfokus pada satu isu tertentu, tetapi berkembang menjadi kritik terhadap kualitas demokrasi secara lebih luas. Isu mengenai pelemahan lembaga pengawas negara, meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis, pembatasan kebebasan berekspresi, hingga menguatnya dominasi kekuasaan eksekutif menjadi bagian dari tuntutan yang terus muncul dalam berbagai demonstrasi. Situasi tersebut memperlihatkan adanya keresahan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (Economist Intelligence Unit, 2023; East Asia Forum, 2025).

Juan J. Linz menjelaskan bahwa salah satu karakter utama rezim yang memiliki kecenderungan otoritarian adalah terbatasnya pluralisme politik, melemahnya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, penggunaan represi secara selektif terhadap kelompok oposisi, serta adanya kecenderungan mengurangi partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Linz, 2000). Kerangka tersebut menjadi penting untuk membaca dinamika politik Indonesia pada periode 2020–2025 karena berbagai peristiwa yang terjadi memperlihatkan adanya hubungan antara kebijakan negara dengan meningkatnya gerakan protes dari masyarakat sipil, khususnya mahasiswa.

Kondisi tersebut menjadikan gerakan mahasiswa kembali memperoleh perhatian sebagai aktor non-negara yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Melalui demonstrasi, konsolidasi antarkampus, kampanye digital, hingga penyusunan tuntutan politik, mahasiswa berupaya membangun tekanan terhadap pemerintah agar kebijakan yang dianggap bermasalah dapat dikaji kembali. Gerakan tersebut tidak hanya bergantung pada jumlah massa yang turun ke jalan, tetapi juga pada kemampuan membangun solidaritas, memperoleh legitimasi publik, dan mempertahankan komitmen perjuangan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Karakteristik tersebut sejalan dengan

konsep Worthiness, Unity, Numbers, dan Commitment (WUNC) yang dikemukakan Charles Tilly sebagai unsur penting dalam gerakan sosial (Tilly, 2004).

Salah satu perkembangan yang menarik selama gelombang demonstrasi tersebut adalah semakin seringnya penggunaan simbol-simbol budaya populer dalam ruang aksi. Penggunaan Jolly Roger menjadi contoh yang paling menonjol karena simbol tersebut tidak berasal dari sejarah politik Indonesia, melainkan dari serial manga dan anime *One Piece* karya Eiichiro Oda. Kehadirannya dalam demonstrasi memperlihatkan bahwa simbol budaya populer dapat mengalami transformasi makna ketika digunakan dalam konteks politik yang berbeda. Simbol yang semula merepresentasikan identitas kelompok Straw Hat Pirates berkembang menjadi media penyampaian kritik terhadap relasi kekuasaan di dunia nyata (Edelman, 1964).

Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak tahun 2020 memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa Indonesia mengalami perubahan baik dari sisi isu maupun strategi perjuangan. Aksi yang semula berpusat pada penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja kemudian berkembang menjadi kritik terhadap berbagai kebijakan yang dipandang melemahkan demokrasi, mempersempit ruang partisipasi publik, serta mengurangi fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak lagi bergerak secara reaktif terhadap satu kebijakan tertentu, tetapi mulai membangun agenda yang lebih luas mengenai perlindungan demokrasi, supremasi hukum, dan hak-hak sipil (BEM Seluruh Indonesia, 2024).

Perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap. Setiap kebijakan yang memunculkan kontroversi direspons melalui demonstrasi, konsolidasi antarkampus, kampanye digital, hingga pembentukan aliansi dengan kelompok masyarakat sipil lainnya. Pola tersebut memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa pada periode 2020–2025 memiliki kesinambungan isu, bukan sekadar aksi yang muncul secara sporadis. Rangkaian peristiwa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Kronologi Gerakan Mahasiswa Indonesia 2020–2025

Tahun	Peristiwa Kunci	Deskripsi Singkat	Dampak Utama
2020	Pengesahan Omnibus Law	Protes massal, #TolakOmnibusLaw trending global	Mobilisasi digital pertama, 5 juta tweet
2021	Revisi UU KPK	Demonstrasi “Selamatkan KPK”	Perhatian media internasional (BBC)
2022	Revisi UU Minerba	Aksi di daerah tambang, kepung DPR	Elit politik kabur
2023	Eskalasi represi	1.247 mahasiswa ditangkap	Radikalisasi tuntutan
2024	Pasal karet UU ITE	12 aktivis senior diproses hukum	Blacklist dari dunia kerja
2025	Kematian Affan Kurniawan	Picu “17+8 Demands”	10 juta tweet #17plus8Demands
2025	Pengibaran Jolly Roger (HUT RI)	Ribuan kibarkan bendera Topi Jerami	Simbol budaya populer viral
2025	Aksi puncak Oktober	Ribuan turun jalan	Penundaan implementasi KUHP

Sumber: diolah penulis berdasarkan BEM Seluruh Indonesia (2024), East Asia Forum (2025), serta berbagai pemberitaan yang relevan.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa selama periode 2020–2025 tidak berdiri sebagai rangkaian peristiwa yang terpisah. Setiap aksi memiliki keterkaitan dengan aksi berikutnya karena berangkat dari keresahan yang relatif sama, yaitu kualitas demokrasi, hubungan negara dengan masyarakat sipil, serta ruang kebebasan politik. Intensitas demonstrasi yang terus muncul menunjukkan bahwa persoalan yang diprotes belum memperoleh penyelesaian yang mampu meredakan ketegangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.

Di tengah perkembangan tersebut, muncul satu fenomena yang membedakan gelombang demonstrasi periode 2020–2025 dengan periode sebelumnya, yaitu semakin luasnya penggunaan simbol budaya populer sebagai media komunikasi politik. Jika pada demonstrasi Reformasi 1998 simbol yang digunakan lebih banyak berupa bendera organisasi, poster, maupun slogan politik, maka pada demonstrasi kontemporer mulai muncul simbol yang berasal dari film, komik, gim, dan anime. Salah satu simbol yang paling banyak menarik perhatian publik adalah Jolly Roger milik Straw Hat Pirates dalam serial *One Piece*. Penggunaan simbol tersebut menunjukkan bahwa generasi muda mulai memanfaatkan bahasa budaya populer yang mereka pahami bersama untuk menyampaikan kritik terhadap situasi politik yang sedang berlangsung.

Fenomena tersebut menjadi menarik karena Jolly Roger pada awalnya tidak diciptakan sebagai simbol gerakan politik di dunia nyata. Dalam cerita *One Piece*, bendera tersebut merupakan identitas kelompok Straw Hat Pirates yang dipimpin Monkey D. Luffy. Namun, ketika simbol yang sama dikibarkan dalam demonstrasi mahasiswa Indonesia, maknanya mengalami perluasan. Simbol tersebut tidak lagi dipahami hanya sebagai identitas kelompok bajak laut fiktif, tetapi berubah menjadi representasi keberanian melawan dominasi kekuasaan, membela kelompok yang tertindas, serta mempertahankan kebebasan. Perubahan makna inilah yang menunjukkan bahwa simbol politik bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial tempat simbol tersebut digunakan (Edelman, 1964).

Fenomena penggunaan Jolly Roger dalam demonstrasi mahasiswa memperlihatkan bahwa simbol budaya populer dapat mengalami perubahan fungsi ketika digunakan dalam ruang politik. Simbol yang awalnya hanya dikenal sebagai bagian dari narasi fiksi berubah menjadi media komunikasi politik yang mampu merepresentasikan keresahan kolektif masyarakat. Pergeseran makna tersebut menunjukkan bahwa simbol tidak memiliki arti yang bersifat tetap, tetapi dibentuk melalui pengalaman sosial, situasi politik, dan interpretasi para penggunanya. Murray Edelman menjelaskan bahwa simbol politik bekerja sebagai instrumen yang mampu menyederhanakan persoalan politik yang kompleks menjadi pesan yang mudah dipahami masyarakat.

Melalui simbol, suatu kelompok dapat membangun identitas bersama, memperkuat solidaritas, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kekuasaan tanpa harus selalu menggunakan pernyataan politik yang eksplisit (Edelman, 1964).



Gambar 1. 1 Pengibaran Bendera Jolly

Penggunaan simbol tersebut memperlihatkan bahwa Jolly Roger tidak lagi dipahami sebatas identitas kelompok bajak laut dalam karya fiksi. Simbol tersebut telah mengalami transformasi makna menjadi media komunikasi politik yang digunakan untuk membangun identitas kolektif dan menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Perspektif Murray Edelman menjelaskan bahwa simbol politik memperoleh makna melalui proses sosial dan pengalaman kolektif masyarakat (Edelman, 1964).

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa simbol yang berasal dari karya budaya populer dapat memperoleh tempat dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Bagi sebagian besar generasi muda, anime bukan lagi dipandang sebagai hiburan semata, melainkan bagian dari pengalaman sosial yang membentuk cara mereka memahami nilai-nilai tertentu, seperti kebebasan, keadilan, persahabatan, dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Nilai-nilai tersebut kemudian dipertemukan dengan realitas politik yang mereka hadapi sehingga simbol-simbol dalam anime memperoleh makna baru ketika digunakan dalam ruang publik. Stuart Hall menyebut proses tersebut sebagai pembentukan makna melalui praktik sosial, ketika audiens tidak hanya menerima pesan dari suatu karya budaya, tetapi juga menghasilkan penafsiran baru sesuai dengan konteks yang mereka alami (Hall, 1980).

Salah satu karya budaya populer yang paling banyak digunakan sebagai rujukan dalam berbagai ekspresi politik generasi muda adalah **One Piece** karya Eiichiro Oda. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, serial ini berkembang menjadi salah satu manga dengan jumlah pembaca terbesar di dunia dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Popularitas tersebut menjadikan *One Piece* tidak hanya dikenal sebagai karya hiburan, tetapi juga sebagai cerita yang banyak memuat persoalan mengenai kekuasaan, ketidakadilan, diskriminasi, kebebasan, hingga perjuangan melawan dominasi politik (Guinness World Records, 2024).

Konflik utama dalam *One Piece* berpusat pada hubungan antara World Government dengan berbagai kelompok yang menolak dominasi kekuasaannya. World Government digambarkan sebagai pemerintahan global yang memiliki kewenangan sangat besar terhadap kehidupan politik dunia. Kekuasaan tersebut dijalankan melalui pengendalian informasi, penggunaan kekuatan militer, penghapusan sejarah tertentu, serta tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Berbagai praktik tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pembatasan ruang politik dan penguatan kontrol terhadap masyarakat, sehingga banyak penelitian menempatkan World Government sebagai representasi kekuasaan yang memiliki karakteristik otoritarian (Oda, 1997–2025).

Apabila dikaitkan dengan konsep Juan J. Linz, karakteristik tersebut memperlihatkan beberapa ciri yang sering ditemukan dalam rezim otoritarian, seperti terbatasnya pluralisme politik, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penguasa, penggunaan tindakan represif terhadap kelompok oposisi, serta kecenderungan mengendalikan partisipasi masyarakat dalam ruang politik (Linz, 2000). Penelitian ini tidak bermaksud menyamakan World Government dengan pemerintahan Indonesia karena keduanya berada dalam konteks yang berbeda. Kerangka Linz digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana struktur kekuasaan tertentu dapat memunculkan respons berupa gerakan perlawanan dari aktor-aktor yang berada di luar sistem kekuasaan.

Dalam struktur tersebut muncul Straw Hat Pirates, kelompok yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Kelompok ini tidak memiliki kekuasaan

formal, wilayah pemerintahan, maupun sumber daya politik sebagaimana dimiliki World Government. Meskipun demikian, Straw Hat Pirates mampu membangun pengaruh melalui jaringan pertemanan, solidaritas dengan kelompok-kelompok yang mengalami penindasan, serta konsistensi dalam memperjuangkan kebebasan. Posisi mereka menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa aktor non-negara tetap dapat menjadi kekuatan politik yang berpengaruh meskipun tidak memiliki instrumen kekuasaan formal.

Karakteristik tersebut memiliki kemiripan dengan posisi gerakan mahasiswa di Indonesia. Mahasiswa juga bukan bagian dari struktur pemerintahan dan tidak memiliki kewenangan formal dalam proses pengambilan kebijakan negara. Pengaruh politik yang mereka miliki lahir dari kemampuan membangun solidaritas, mengorganisasi aksi kolektif, memperoleh dukungan masyarakat, dan mempertahankan legitimasi moral atas tuntutan yang diperjuangkan. Persamaan posisi sebagai aktor non-negara inilah yang menjadi titik awal komparasi dalam penelitian ini, bukan karena keduanya berasal dari ruang yang sama, melainkan karena sama-sama memperlihatkan pola perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang lebih dominan.

Kesamaan posisi antara Straw Hat Pirates dan gerakan mahasiswa Indonesia memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap kekuasaan tidak selalu dilakukan oleh aktor yang memiliki kewenangan formal. Kedua kelompok sama-sama berada di luar struktur pemerintahan, tetapi mampu membangun pengaruh melalui tindakan kolektif yang memperoleh dukungan dari masyarakat. Pengaruh tersebut tidak lahir dari kepemilikan kekuasaan politik, melainkan dari kemampuan membangun kepercayaan, memperluas jaringan solidaritas, dan mempertahankan konsistensi perjuangan. Persamaan karakter inilah yang menjadikan keduanya relevan untuk dikaji dalam satu kerangka analisis.

Charles Tilly memandang gerakan sosial sebagai proses politik yang dibangun melalui tindakan kolektif secara berkelanjutan. Gerakan tidak hanya diukur dari besarnya demonstrasi atau jumlah massa yang terlibat, tetapi juga dari kemampuan aktor membangun legitimasi, menjaga persatuan, memperluas dukungan, dan mempertahankan komitmen perjuangan. Empat unsur tersebut dikenal sebagai Worthiness, Unity, Numbers, dan Commitment (WUNC) yang

menjadi indikator penting dalam membaca kekuatan suatu gerakan sosial (Tilly, 2004).

Aspek worthiness berkaitan dengan legitimasi moral yang dimiliki suatu gerakan. Straw Hat Pirates memperoleh dukungan dari berbagai kelompok karena tindakan mereka dipandang sebagai upaya membela masyarakat yang mengalami penindasan. Mereka tidak melakukan perlawanan untuk memperoleh kekuasaan, melainkan untuk mengembalikan kebebasan kepada pihak yang dirugikan oleh World Government maupun penguasa lokal. Pola yang relatif serupa dapat ditemukan dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada periode 2020–2025 umumnya tidak diarahkan untuk memperoleh jabatan politik, tetapi berangkat dari kritik terhadap kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat. Legitimasi moral tersebut menjadi salah satu alasan mengapa aksi mahasiswa mampu memperoleh simpati dari berbagai kelompok masyarakat (Tilly, 2004; BEM Seluruh Indonesia, 2024).

Aspek unity tercermin melalui kemampuan membangun identitas kolektif. Straw Hat Pirates terdiri atas individu-individu yang memiliki latar belakang, ras, dan pengalaman hidup yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk membentuk solidaritas karena seluruh anggota memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kebebasan dan melawan ketidakadilan. Gerakan mahasiswa Indonesia juga menunjukkan karakter yang serupa. Mahasiswa berasal dari berbagai perguruan tinggi, organisasi, daerah, bahkan memiliki orientasi politik yang tidak selalu sama. Meskipun demikian, mereka mampu membangun kerja sama melalui kesamaan kepentingan dalam mengawal demokrasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Aspek numbers tidak hanya dimaknai sebagai besarnya jumlah partisipan, tetapi juga kemampuan gerakan memperluas dukungan di luar kelompok inti. Dalam *One Piece*, pengaruh Straw Hat Pirates berkembang seiring bertambahnya kelompok yang memilih berdiri bersama mereka setelah merasakan dampak langsung dari tindakan World Government. Dukungan tersebut terus meluas hingga terbentuk aliansi dengan berbagai kerajaan, suku, dan kelompok bajak laut lainnya. Gerakan mahasiswa Indonesia

memperlihatkan pola yang hampir serupa melalui keterlibatan organisasi masyarakat sipil, akademisi, buruh, petani, seniman, hingga masyarakat umum yang ikut menyuarakan isu-isu demokrasi melalui demonstrasi maupun media sosial. Dukungan lintas kelompok tersebut memperkuat posisi gerakan dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah (Tilly, 2004).

Aspek terakhir adalah *commitment*, yaitu kesediaan anggota gerakan untuk tetap mempertahankan perjuangan meskipun menghadapi berbagai risiko. Dalam cerita *One Piece*, komitmen tersebut terlihat dari konsistensi Straw Hat Pirates menghadapi ancaman World Government tanpa meninggalkan tujuan awal mereka. Pada konteks Indonesia, komitmen mahasiswa tampak melalui keberlanjutan aksi demonstrasi, advokasi kebijakan, hingga kesiapan menghadapi berbagai bentuk tekanan seperti intimidasi, tindakan represif aparat, maupun kriminalisasi terhadap aktivis. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak berhenti pada satu aksi, tetapi berkembang menjadi proses politik yang berlangsung secara terus-menerus (Tilly, 2004).

Keempat unsur WUNC tersebut memperlihatkan bahwa terdapat pola yang dapat dibandingkan antara Straw Hat Pirates dan gerakan mahasiswa Indonesia. Persamaan tersebut tidak berarti kedua objek diposisikan sebagai fenomena yang identik. *One Piece* merupakan karya fiksi yang dibangun melalui narasi imajinatif, sedangkan gerakan mahasiswa berlangsung dalam realitas politik yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, hukum, dan institusi negara. Perbedaan konteks tersebut justru membuka ruang untuk melihat apakah pola-pola perlawanan terhadap kekuasaan memiliki karakter yang serupa meskipun muncul dalam lingkungan yang berbeda.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini tidak bertujuan membuktikan bahwa kondisi politik Indonesia sama dengan dunia yang digambarkan dalam *One Piece*. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk gerakan sosial yang dibangun oleh kedua aktor, cara mereka memperoleh legitimasi, membentuk solidaritas, memperluas dukungan, mempertahankan komitmen perjuangan, serta memanfaatkan simbol politik sebagai bagian dari strategi perlawanan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pembacaan

yang lebih komprehensif mengenai dinamika perlawanan anti-otoritarian dalam konteks budaya populer maupun realitas politik kontemporer.

Kajian mengenai *One Piece* maupun gerakan mahasiswa Indonesia telah berkembang dalam berbagai disiplin ilmu. Penelitian yang menggunakan *One Piece* sebagai objek kajian umumnya berfokus pada aspek sastra, budaya populer, komunikasi, psikologi, dan representasi sosial. Beberapa penelitian membahas konstruksi kepemimpinan Monkey D. Luffy, nilai persahabatan, representasi keadilan, hingga kritik terhadap ketimpangan sosial dalam narasi *One Piece*. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan *One Piece* sebagai teks budaya, sehingga pembahasannya belum diarahkan untuk melihat dinamika gerakan sosial dan pola perlawanan terhadap kekuasaan menggunakan perspektif ilmu politik.

Di sisi lain, penelitian mengenai gerakan mahasiswa Indonesia periode pasca-Reformasi lebih banyak menitikberatkan pada strategi mobilisasi massa, penggunaan media sosial, framing gerakan, partisipasi politik generasi muda, maupun respons negara terhadap demonstrasi. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan gerakan mahasiswa dalam konteks demokrasi Indonesia, tetapi belum menghubungkannya dengan representasi gerakan sosial yang terdapat dalam budaya populer.

Beberapa penelitian juga telah menggunakan teori Charles Tilly untuk menganalisis gerakan mahasiswa, sedangkan penelitian lain memanfaatkan teori Murray Edelman untuk mengkaji simbol politik dalam demonstrasi. Penelitian mengenai otoritarianisme menggunakan pendekatan Juan J. Linz juga telah banyak dilakukan dalam konteks negara dan rezim politik. Namun, ketiga perspektif tersebut masih digunakan secara terpisah sesuai dengan fokus masing-masing penelitian.

Celah penelitian terletak pada belum adanya kajian yang mengomparasikan bentuk perlawanan anti-otoritarian dalam Straw Hat Pirates dan gerakan mahasiswa Indonesia menggunakan kerangka analisis yang sama. Penelitian ini tidak hanya membandingkan dua objek yang berbeda, tetapi juga menghubungkan teori otoritarianisme Juan J. Linz untuk membaca struktur kekuasaan, teori gerakan sosial Charles Tilly untuk menganalisis bentuk

perlawanan, teori simbol politik Murray Edelman untuk memahami transformasi makna simbol, serta metode komparatif John Stuart Mill untuk menemukan persamaan dan perbedaan kedua objek penelitian. Kombinasi tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara budaya populer dan gerakan sosial dalam kajian ilmu politik.

Perkembangan budaya populer yang semakin dekat dengan kehidupan generasi muda telah mengubah cara masyarakat memahami dan mengekspresikan persoalan politik. Simbol, tokoh, maupun narasi yang berasal dari karya fiksi tidak lagi berhenti sebagai produk hiburan, tetapi mulai digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, membangun solidaritas, dan memperkuat identitas kolektif dalam gerakan sosial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa budaya populer telah menjadi bagian dari praktik politik kontemporer yang layak dikaji melalui perspektif ilmu politik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian gerakan sosial di Indonesia, khususnya mengenai hubungan antara budaya populer dan praktik perlawanan politik. Selain memperkaya kajian akademik, hasil penelitian juga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat dalam memahami bagaimana simbol-simbol budaya populer memperoleh makna politik ketika digunakan dalam ruang publik. Kajian ini juga membuka ruang diskusi mengenai perubahan bentuk komunikasi politik generasi muda yang semakin memanfaatkan simbol visual sebagai media penyampaian aspirasi.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini disusun dengan judul **"Komparasi Perlawanan Anti-Otoritarian melalui Gerakan Sosial: Straw Hat Pirates di One Piece dan Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 2020–2025."** Judul tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan fokus penelitian, yaitu mengkaji bentuk perlawanan yang dilakukan oleh aktor non-negara dalam dua konteks yang berbeda melalui pendekatan komparatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gerakan perlawanan Anti-Otoritarian dalam serial One Piece?
2. Bagaimana Gerakan perlawanan Anti-Otoritarian dalam Gerakan Mahasiswa 2020-2025?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlawanan anti-otoritarian antara one piece dan gerakan mahasiswa Indonesia 2020-2025?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis memberitahukan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis gerakan perlawanan anti-otoritarian yang digambarkan dalam serial One Piece, terutama terkait bentuk gerakan, aktor yang terlibat, mobilisasi, solidaritas, serta simbol politik yang digunakan dalam menghadapi struktur kekuasaan yang dominan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis gerakan perlawanan anti-otoritarian yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa Indonesia periode **2020–2025**, meliputi proses mobilisasi, pembentukan solidaritas, tuntutan politik, serta strategi perlawanan terhadap kekuasaan.
3. Mengomparasikan persamaan dan perbedaan gerakan perlawanan anti-otoritarian antara serial One Piece dan gerakan mahasiswa Indonesia 2020–2025 untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika resistensi terhadap otoritarianisme dalam konteks budaya populer dan realitas politik kontemporer Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian ilmu politik dan komunikasi politik melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis budaya populer dengan teori gerakan sosial. Dengan mengomparasikan Straw Hat Pirates dalam One Piece dan gerakan mahasiswa Indonesia

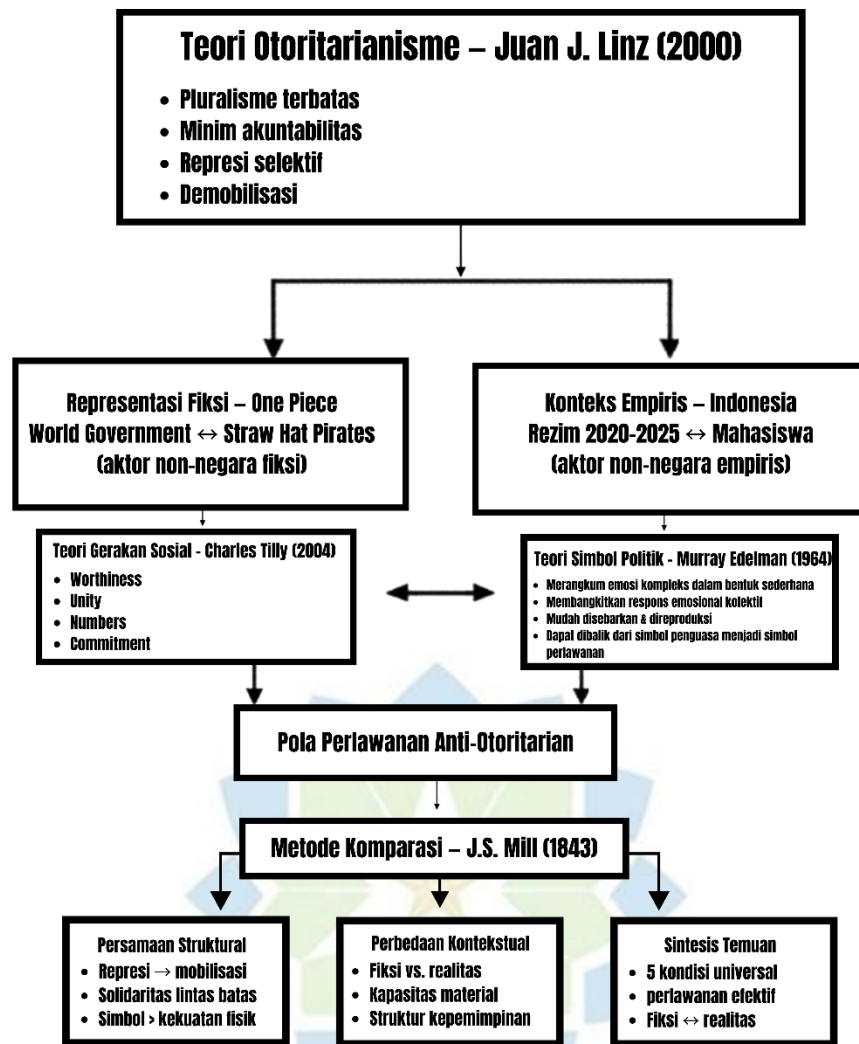
2020–2025 menguntukkan kerangka Charles Tilly, Juan J. Linz, dan Murray Edelman, penelitian ini menawarkan model baru dalam membaca dinamika perlawanan anti-otoritarian melalui teks fiksi yang populer di kalangan generasi muda.

2. Praktis

Bagi Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi aktivis mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil bahwa perlawanan efektif tidak harus bergantung pada kekuatan formal, melainkan dapat dibangun melalui solidaritas moral dan kreativitas simbolik. Bagi pendidik, penelitian ini menunjukkan potensi One Piece sebagai media pendidikan kewargaan yang relevan. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menjadi pengingat akan pentingnya membuka ruang dialog dengan generasi muda agar krisis kepercayaan terhadap demokrasi tidak semakin dalam.

E. Kerangka Berpikir

Hal yang paling fundamental dalam penelitian yang akan dilakukan adalah kerangka berpikir, yang berfungsi sebagai dasar utama dalam mengarahkan seluruh proses penelitian. Kerangka berpikir ini tidak hanya menentukan struktur pemikiran yang akan diterapkan, tetapi juga memberikan panduan dalam merumuskan tujuan, menetapkan pertanyaan penelitian, serta memilih metodologi yang tepat. Dengan adanya kerangka berpikir yang jelas, peneliti dapat menjaga konsistensi dalam menginterpretasikan data dan menyimpulkan temuan, sehingga proses penelitian dapat berlangsung secara teratur dan terarah.



Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa perlawanan politik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari hubungan dinamis antara struktur kekuasaan, kondisi sosial-politik, serta kemampuan aktor tertentu dalam membangun resistensi. Dalam konteks penelitian ini, perlawanan anti-otoritarian dipahami bukan hanya sebagai tindakan penolakan terhadap penguasa, tetapi sebagai proses politik yang melibatkan bagaimana suatu kelompok membaca ketidakadilan, membangun kesadaran kolektif, melakukan mobilisasi, serta menciptakan simbol dan narasi yang mampu memperkuat perjuangan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menjadikan Jolly Roger sebagai titik awal analisis, melainkan melihatnya sebagai salah satu hasil dari proses panjang pembentukan identitas dan ekspresi politik dalam suatu gerakan perlawanan.

Kerangka berpikir penelitian ini diawali dengan teori otoritarianisme Juan J. Linz (2000) yang ditempatkan sebagai dasar untuk memahami kondisi struktural yang memungkinkan munculnya perlawanan. Penempatan teori Linz pada bagian awal bukan berarti penelitian hanya berfokus pada kajian rezim otoritarian, melainkan karena teori tersebut memberikan kerangka untuk membaca bagaimana karakteristik kekuasaan tertentu dapat menciptakan ruang konflik antara penguasa dan kelompok masyarakat yang berada di luar struktur kekuasaan. Dengan kata lain, Linz digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam penelitian ini, yaitu dalam kondisi kekuasaan seperti apa suatu kelompok kemudian membangun perlawanan.

Menurut Linz (2000), otoritarianisme memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem demokrasi maupun totalitarianisme. Otoritarianisme tidak selalu bekerja melalui penghapusan politik secara menyeluruh, tetapi melalui pembatasan terhadap ruang politik, pengendalian terhadap kelompok kritis, serta pelemahan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Salah satu karakteristik utama adalah terbatasnya pluralisme politik, yaitu kondisi ketika keberagaman kepentingan politik masih dapat muncul, tetapi ruang pengaruhnya dibatasi oleh struktur kekuasaan yang dominan. Dalam kondisi tersebut, kelompok oposisi maupun masyarakat kritis masih memiliki ruang untuk bersuara, tetapi tidak memiliki kesempatan yang setara untuk memengaruhi keputusan politik.

Karakteristik kedua adalah rendahnya tingkat akuntabilitas kekuasaan. Kekuasaan yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang efektif cenderung menghasilkan hubungan politik yang tidak seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Ketika lembaga pengawasan melemah atau tidak mampu menjalankan fungsi kontrol secara optimal, keputusan politik lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok yang berkuasa. Kondisi tersebut kemudian dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Karakteristik ketiga adalah penggunaan represi secara selektif. Dalam konteks otoritarianisme, represi tidak selalu dilakukan dalam bentuk kekerasan terbuka terhadap seluruh masyarakat, tetapi dapat dilakukan melalui tindakan yang ditujukan kepada kelompok tertentu yang dianggap mengganggu stabilitas

kekuasaan. Represi selektif berfungsi tidak hanya untuk menghentikan kelompok yang melakukan kritik, tetapi juga menciptakan efek psikologis agar kelompok lain mengurangi keberanian untuk melakukan perlawanan.

Karakteristik terakhir adalah demobilisasi politik, yaitu kondisi ketika kekuasaan berusaha mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Demobilisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembatasan ruang partisipasi publik, penciptaan apatisme politik, atau pembentukan persepsi bahwa masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan negara. Dalam kondisi tersebut, masyarakat didorong untuk menjadi objek politik, bukan aktor yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah kekuasaan.

Keempat karakteristik otoritarianisme tersebut menjadi dasar penelitian untuk membaca dua konteks yang berbeda, yaitu struktur kekuasaan World Government dalam *One Piece* dan dinamika politik Indonesia pada periode 2020–2025. Kedua konteks tersebut tidak diposisikan sebagai fenomena yang identik, karena satu berada dalam ruang fiksi sementara lainnya berada dalam realitas politik. Namun, keduanya memiliki titik temu analitis, yaitu bagaimana kelompok yang berada di luar struktur kekuasaan formal merespons dominasi dan membangun bentuk perlawanan.

Dalam konteks *One Piece*, penelitian melihat World Government sebagai representasi fiksi mengenai struktur kekuasaan yang memiliki kecenderungan otoritarian. Kekuasaan World Government tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kemampuan mengontrol informasi, menentukan sejarah yang dapat diketahui masyarakat, serta menjaga legitimasi politik melalui struktur pemerintahan global. Penghilangan sejarah tertentu, larangan terhadap penelitian Poneglyph, serta tindakan terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan menunjukkan bagaimana kontrol terhadap pengetahuan dan informasi menjadi bagian dari mekanisme dominasi.

Dalam struktur kekuasaan tersebut, Straw Hat Pirates hadir sebagai aktor non-negara yang melakukan perlawanan. Posisi mereka penting dalam penelitian karena menunjukkan bahwa kekuatan politik tidak selalu berasal dari institusi formal atau kepemilikan sumber daya negara. Straw Hat Pirates tidak

memiliki pemerintahan, birokrasi, maupun wilayah kekuasaan, tetapi mampu membangun pengaruh melalui jaringan hubungan sosial, solidaritas dengan kelompok lain, serta legitimasi moral dari tindakan mereka. Perlawanan yang dilakukan Straw Hat Pirates tidak hanya berkaitan dengan konflik fisik, tetapi juga berkaitan dengan perjuangan terhadap nilai kebebasan, penolakan terhadap dominasi, dan pembelaan terhadap kelompok yang mengalami ketidakadilan.

Sementara itu, pada konteks Indonesia tahun 2020–2025, penelitian melihat gerakan mahasiswa sebagai bentuk perlawanan aktor non-negara dalam ruang politik nyata. Mahasiswa secara historis memiliki posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Mereka tidak memiliki kewenangan formal dalam pemerintahan, tetapi memiliki kemampuan politik melalui organisasi, jaringan antar kelompok, ruang akademik, serta kemampuan membangun opini publik.

Gerakan mahasiswa pada periode tersebut dipahami sebagai respons terhadap berbagai dinamika politik yang berkaitan dengan demokrasi, partisipasi publik, kebijakan negara, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Perlawanan mahasiswa tidak hanya dilihat dari aksi demonstrasi, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan pembentukan tuntutan bersama, pembangunan solidaritas, serta usaha memengaruhi arah kebijakan politik.

Setelah memahami konteks struktural yang melatarbelakangi munculnya perlawanan, penelitian kemudian bergerak pada tahap berikutnya, yaitu bagaimana perlawanan tersebut dapat berkembang menjadi suatu gerakan sosial yang memiliki kemampuan untuk bertahan dan menghasilkan pengaruh politik. Pada tahap ini, penelitian menggunakan teori gerakan sosial Charles Tilly (2004) sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana aktor-aktor non-negara membangun kapasitas kolektif dalam menghadapi struktur kekuasaan yang lebih dominan. Penggunaan teori Tilly didasarkan pada pemahaman bahwa keberadaan ketidakpuasan terhadap kekuasaan tidak secara otomatis menghasilkan gerakan sosial. Suatu kelompok baru dapat menjadi gerakan sosial ketika mampu mengorganisasi tuntutan, membangun identitas bersama, mengembangkan jaringan dukungan, serta mempertahankan perjuangan melalui tindakan kolektif.

Dalam perspektif Tilly, gerakan sosial merupakan bentuk politik kolektif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ketika mereka berusaha menyampaikan tuntutan terhadap pihak yang memiliki kekuasaan. Gerakan sosial tidak hanya dilihat dari jumlah massa atau bentuk aksi yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuan aktor dalam membangun legitimasi, solidaritas, dan keberlanjutan perjuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep WUNC (*Worthiness, Unity, Numbers, Commitment*) sebagai instrumen untuk menganalisis bagaimana gerakan perlawanan anti-otoritarian terbentuk dalam *One Piece* dan gerakan mahasiswa Indonesia tahun 2020–2025.

Aspek pertama dalam WUNC adalah *worthiness* atau kelayakan moral. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu gerakan membutuhkan legitimasi agar perjuangannya dapat diterima oleh kelompok yang lebih luas. Sebuah gerakan tidak hanya bertahan karena adanya kemarahan terhadap kondisi tertentu, tetapi karena mampu menunjukkan bahwa tuntutan yang mereka bawa memiliki dasar moral dan kepentingan publik. Dalam konteks *One Piece*, legitimasi moral Straw Hat Pirates terbentuk melalui tindakan mereka dalam membela kelompok yang mengalami penindasan, menentang ketidakadilan, serta membantu masyarakat yang berada dalam posisi lemah akibat struktur kekuasaan yang dominan. Perlawanan mereka memperoleh dukungan bukan semata karena kekuatan, tetapi karena masyarakat melihat adanya nilai keadilan dan kebebasan dalam tindakan mereka.

Dalam konteks gerakan mahasiswa Indonesia, aspek *worthiness* terlihat melalui bagaimana mahasiswa membangun legitimasi perjuangan melalui isu-isu yang dianggap berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, tuntutan terhadap transparansi kekuasaan, serta perjuangan mempertahankan ruang demokrasi menjadi dasar moral yang digunakan mahasiswa untuk mendapatkan dukungan publik. Dengan demikian, baik dalam *One Piece* maupun gerakan mahasiswa, legitimasi moral menjadi faktor penting yang memungkinkan kelompok perlawanan memperoleh penerimaan sosial.

Aspek kedua adalah *unity* atau persatuan. Tilly melihat bahwa gerakan sosial membutuhkan identitas kolektif agar individu-individu yang memiliki

latar belakang berbeda dapat bergerak dalam arah yang sama. Solidaritas menjadi mekanisme yang menghubungkan pengalaman ketidakadilan individu menjadi perjuangan bersama. Dalam *One Piece*, solidaritas tidak hanya muncul di antara anggota Straw Hat Pirates, tetapi juga melalui hubungan mereka dengan berbagai kelompok lain yang memiliki pengalaman menghadapi dominasi kekuasaan. Identitas perjuangan mereka tidak dibangun berdasarkan kesamaan asal-usul, melainkan berdasarkan nilai bersama mengenai kebebasan dan penolakan terhadap ketidakadilan.

Hal yang serupa terlihat dalam gerakan mahasiswa Indonesia, di mana solidaritas dibangun melalui proses konsolidasi antarorganisasi, aliansi mahasiswa, serta keterlibatan berbagai kelompok yang memiliki perhatian terhadap persoalan politik tertentu. Solidaritas dalam gerakan mahasiswa tidak selalu berarti seluruh aktor memiliki pandangan yang sama mengenai semua persoalan, tetapi terdapat titik temu berupa kesamaan keresahan dan tujuan dalam mengkritisi kekuasaan.

Aspek ketiga adalah *numbers* atau jumlah dukungan. Dalam teori Tilly, jumlah partisipan memiliki arti penting karena menunjukkan kapasitas gerakan dalam memperoleh dukungan sosial dan menciptakan tekanan politik. Namun, jumlah tidak hanya dipahami secara kuantitatif, melainkan juga menunjukkan kemampuan gerakan memperluas pengaruh di luar kelompok inti. Dalam *One Piece*, pengaruh Straw Hat Pirates berkembang karena perjuangan mereka mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai kelompok yang sebelumnya mengalami ketidakadilan. Sementara dalam gerakan mahasiswa Indonesia, jumlah partisipasi massa, dukungan masyarakat, serta penyebaran isu melalui ruang publik dan media digital menjadi faktor yang memperkuat daya tekan gerakan.

Aspek terakhir adalah *commitment* atau komitmen perjuangan. Aspek ini menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melakukan mobilisasi awal, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan perjuangan ketika menghadapi tekanan. Dalam *One Piece*, komitmen terlihat melalui konsistensi Straw Hat Pirates dalam mempertahankan nilai yang mereka perjuangkan meskipun harus menghadapi kekuatan yang jauh

lebih besar. Dalam gerakan mahasiswa Indonesia, komitmen terlihat melalui keberlanjutan advokasi, konsistensi kritik terhadap kebijakan tertentu, serta keberanian menghadapi berbagai konsekuensi politik dari aktivitas gerakan.

Melalui analisis WUNC tersebut, penelitian dapat melihat bahwa baik Straw Hat Pirates maupun gerakan mahasiswa Indonesia memiliki pola tertentu dalam membangun perlawanan. Keduanya tidak hanya bergerak karena adanya konflik dengan kekuasaan, tetapi melalui proses pembentukan legitimasi, solidaritas, mobilisasi, dan komitmen kolektif. Namun, penelitian tetap mempertahankan perbedaan konteks bahwa satu berlangsung dalam dunia fiksi, sementara lainnya berlangsung dalam realitas politik yang memiliki konsekuensi sosial dan politik secara langsung.

Selain melihat dimensi organisasi dan proses gerakan melalui teori Tilly, penelitian ini juga memasukkan teori simbol politik Murray Edelman (1964) untuk memahami bagaimana suatu gerakan membangun makna dan identitas politik. Penggunaan teori Edelman didasarkan pada pemahaman bahwa gerakan sosial tidak hanya membutuhkan kemampuan mobilisasi secara material, tetapi juga membutuhkan simbol yang mampu menyederhanakan gagasan, membangun emosi kolektif, dan memperkuat rasa keterikatan antaranggota gerakan.

Menurut Edelman, simbol politik memiliki fungsi penting karena mampu mengubah konsep politik yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami masyarakat. Simbol bekerja bukan hanya sebagai tanda visual, tetapi sebagai alat komunikasi politik yang membawa nilai, pengalaman, dan harapan suatu kelompok. Oleh karena itu, simbol memiliki kekuatan untuk membangun persepsi mengenai siapa yang menjadi bagian dari kelompok perjuangan, apa yang diperjuangkan, dan siapa yang dianggap sebagai pihak yang berlawanan.

Dalam penelitian ini, simbol politik tidak hanya dilihat melalui Jolly Roger, tetapi juga melalui berbagai bentuk simbolisasi yang muncul dalam proses perlawanan. Dalam *One Piece*, Jolly Roger menjadi salah satu bentuk simbol yang merepresentasikan identitas kelompok, kebebasan, dan penolakan terhadap dominasi kekuasaan. Namun, makna simbol tersebut tidak muncul

secara otomatis dari bentuk visualnya, melainkan terbentuk melalui narasi perjuangan yang melekat pada kelompok pemilik simbol tersebut.

Sementara itu, dalam konteks gerakan mahasiswa Indonesia, simbol politik hadir melalui berbagai bentuk ekspresi seperti slogan, poster, tagar, narasi digital, maupun penggunaan simbol budaya populer dalam ruang aksi. Simbol-simbol tersebut berfungsi untuk memperkuat identitas kolektif, menyampaikan kritik terhadap kekuasaan, serta mempermudah penyebaran pesan politik kepada masyarakat luas.

Dengan demikian, teori Tilly dan Edelman memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penelitian ini. Tilly menjelaskan dimensi struktural dan organisatoris dari gerakan sosial, yaitu bagaimana suatu kelompok membangun kekuatan kolektif melalui mobilisasi, solidaritas, dan komitmen. Sementara Edelman menjelaskan dimensi simbolik, yaitu bagaimana gerakan memberikan makna terhadap perjuangan dan membangun identitas melalui simbol politik. Kombinasi kedua teori tersebut memungkinkan penelitian melihat perlawanan anti-otoritarian secara lebih menyeluruh, baik dari sisi praktik gerakan maupun dari sisi konstruksi makna politik.

Setelah proses analisis terhadap masing-masing objek dilakukan menggunakan kerangka Tilly dan Edelman, penelitian kemudian memasuki tahap komparasi dengan menggunakan metode perbandingan John Stuart Mill (1843). Metode komparasi digunakan karena penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan masing-masing objek secara terpisah, tetapi ingin menemukan pola, persamaan, serta perbedaan antara perlawanan anti-otoritarian dalam *One Piece* dan gerakan mahasiswa Indonesia tahun 2020–2025.

Dalam metode komparasi Mill, penelitian menggunakan prinsip *Method of Agreement* dan *Method of Difference*. Melalui *Method of Agreement*, penelitian mencari aspek-aspek yang memiliki kesamaan dalam kedua objek ketika fenomena perlawanan terjadi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat faktor apa saja yang secara bersama-sama muncul dalam pembentukan perlawanan anti-otoritarian, seperti adanya tekanan dari struktur kekuasaan, munculnya aktor non-negara, proses pembentukan solidaritas, serta penggunaan simbol sebagai instrumen perjuangan.

Sementara itu, melalui *Method of Difference*, penelitian melihat faktor-faktor yang membedakan kedua objek. Perbedaan tersebut penting karena penelitian tidak bertujuan menyamakan antara dunia fiksi dan realitas politik. *One Piece* memiliki karakteristik sebagai narasi fiksi yang dikonstruksi oleh pengarang, sedangkan gerakan mahasiswa berlangsung dalam kondisi politik nyata yang dipengaruhi oleh struktur sosial, institusi negara, dan dinamika masyarakat.

Melalui proses komparasi tersebut, penelitian kemudian menghasilkan pemahaman bahwa perlawanan anti-otoritarian memiliki pola tertentu yang dapat ditemukan dalam konteks yang berbeda. Persamaan utama terletak pada bagaimana kelompok yang berada di luar struktur kekuasaan membangun kekuatan melalui solidaritas, legitimasi moral, dan identitas kolektif. Sementara perbedaannya terletak pada ruang politik, kapasitas aktor, serta konsekuensi yang dihadapi oleh masing-masing kelompok.

Pada akhirnya, kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi suatu simbol menjadi simbol politik tidak dapat dilepaskan dari proses sosial yang lebih luas. Jolly Roger menjadi contoh bagaimana simbol budaya populer dapat memperoleh makna baru ketika bertemu dengan pengalaman politik tertentu. Namun, makna politik tersebut bukan berasal dari simbol itu sendiri, melainkan dari proses perlawanan, solidaritas, dan konstruksi identitas yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan Jolly Roger sebagai pusat tunggal analisis, tetapi sebagai salah satu bentuk manifestasi dari proses yang lebih besar, yaitu bagaimana perlawanan anti-otoritarian dibangun, dipertahankan, dan dimaknai oleh aktor sosial dalam konteks yang berbeda. Melalui pendekatan komparatif antara *One Piece* dan gerakan mahasiswa Indonesia tahun 2020–2025, penelitian berusaha menjelaskan bahwa budaya populer dan realitas politik dapat berinteraksi melalui mekanisme gerakan sosial dan simbolisasi politik.